



SALINAN

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG
JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah ditetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 13);
5. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 165);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 823);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 165) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
 2. Pegawai di Lingkungan Kementerian yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai lain yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian.
 3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
 4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi Jabatan.
 5. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
 6. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
 7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
 8. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat Jabatan berdasarkan nilai suatu Jabatan.
 9. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai untuk meningkatkan kesejahteraan yang pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pegawai wajib melaksanakan tugas sesuai dengan jabatannya.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Kelas Jabatan.
- (3) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada keputusan tentang pengangkatan, pemindahan, dan alih tugas dari dan dalam jabatan dimaksud.

- (4) Daftar nama Jabatan dan Kelas Jabatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. Pasal 3 dihapus.
4. Pasal 4 dihapus.
5. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2022

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 851

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum



Teguh

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 2
TAHUN 2020 TENTANG JABATAN DAN KELAS
JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

A. DAFTAR NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN UNTUK PEJABAT
PIMPINAN TINGGI

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
1	2	3
1.	Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	17
2.	Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	17
3.	Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	17
4.	Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	17
5.	Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	17
6.	Inspektur Jenderal	17
7.	Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	17
8.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	17
9.	Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan	16
10.	Staf Ahli Menteri Pengembangan Ekonomi Lokal pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	16
11.	Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Wilayah	16
12.	Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga	16
13.	Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi	16

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
1	2	3
14.	Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama	15
15.	Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	15
16.	Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi	15
17.	Kepala Biro Hubungan Masyarakat	15
18.	Kepala Biro Hukum	15
19.	Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan	15
20.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	15
21.	Direktur Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan	15
22.	Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan	15
23.	Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan	15
24.	Direktur Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Perdesaan	15
25.	Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa	15
26.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	15
27.	Direktur Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	15
28.	Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	15
29.	Direktur Pelayanan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	15
30.	Direktur Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	15
31.	Direktur Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	15
32.	Sekretaris Direktorat Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	15
33.	Direktur Penyerasian Rencana dan Program Percepatan dan Pembangunan Daerah Tertinggal	15
34.	Direktur Penyerasian Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan	15
35.	Direktur Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana	15

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
1	2	3
36.	Direktur Penyerasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	15
37.	Direktur Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus	15
38.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	15
39.	Direktur Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi	15
40.	Direktur Pembangunan Kawasan Transmigrasi	15
41.	Direktur Fasilitas Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi	15
42.	Direktur Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan	15
43.	Direktur Pengembangan Kawasan Transmigrasi	15
44.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	15
45.	Inspektur I	15
46.	Inspektur II	15
47.	Inspektur III	15
48.	Inspektur IV	15
49.	Inspektur V	15
50.	Sekretaris Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	15
51.	Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	15
52.	Kepala Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	15
53.	Kepala Pusat Penyusunan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	15
54.	Kepala Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	15
55.	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	15
56.	Kepala Pusat Pengembangan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	15

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
57.	Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	15
58.	Kepala Pusat Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian	15
59.	Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional	15
60.	Kepala Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Jakarta	14
61.	Kepala Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yogyakarta	14
62.	Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Pekanbaru	13
63.	Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Denpasar	13
64.	Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Ambon	13
65.	Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Bengkulu	13
66.	Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Makasar	13
67.	Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Banjarmasin	13
68.	Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Jayapura	13

B. DAFTAR NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN UNTUK PEJABAT ADMINISTRASI

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Kepala Bagian Kerja Sama, Biro Perencanaan dan Kerja Sama	12
2.	Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	12
3.	Kepala Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum	12

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
1	2	3
4.	Kepala Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, Biro Umum dan Layanan Pengadaan	12
5.	Kepala Bagian Tata Usaha dan Protokol, Biro Umum dan Layanan Pengadaan	12
6.	Kepala Bagian Layanan Pengadaan, Biro Umum dan Layanan Pengadaan	12
7.	Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	12
8.	Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	12
9.	Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga, Sekretariat Direktorat Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	12
10.	Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga, Sekretariat Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	12
11.	Kepala Bagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Umum, Sekretaris Inspektorat Jenderal	12
12.	Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga, Sekretaris Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	12
13.	Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga, Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	12
14.	Kepala Bagian Tata Usaha, Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Jakarta	12
15.	Kepala Bagian Tata Usaha, Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yogyakarta	12
16.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Biro Perencanaan dan Kerja Sama	9
17.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	9

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
1	2	3
18.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Biro Kepegawaian dan Organisasi	9
19.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Biro Hubungan Masyarakat	9
20.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Biro Hukum	9
21.	Kepala Subbagian Protokol, Biro Umum dan Layanan Pengadaan	9
22.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Biro Umum dan Layanan Pengadaan	9
23.	Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	9
24.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan	9
25.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan	9
26.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan	9
27.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Perdesaan	9
28.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa	9
29.	Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	9
30.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	9
31.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	9
32.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pelayanan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	9
33.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	9

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
1	2	3
34.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	9
35.	Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, Sekretaris Direktorat Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	9
36.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Penyerasian Rencana dan Program Percepatan dan Pembangunan Daerah Tertinggal	9
37.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Penyerasian Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan	9
38.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana	9
39.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Penyerasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	9
40.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus	9
41.	Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, Sekretaris Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	9
42.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi	9
43.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi	9
44.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Fasilitas Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi	9
45.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan	9
46.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi	9
47.	Kepala Subbagian Administrasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Sekretaris Inspektorat Jenderal	9
48.	Kepala Subbagian Umum, Sekretaris Inspektorat Jenderal	9
49.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Inspektorat I	9

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
1	2	3
50.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Inspektorat II	9
51.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Inspektorat III	9
52.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Inspektorat IV	9
53.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Inspektorat V	9
54.	Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, Sekretaris Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	9
55.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	9
56.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	9
57.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Penyusunan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	9
58.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	9
59.	Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	9
60.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Pengembangan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	9
61.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Pelatihan Sumber Daya Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	9
62.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian	9
63.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional	9
64.	Kepala Subbagian Rencana, Program dan Pelaporan Bagian Tata Usaha, Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Jakarta	9

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
1	2	3
65.	Kepala Subbagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum, Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Jakarta	9
66.	Kepala Subbagian Rencana, Program dan Pelaporan, Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yogyakarta	9
67.	Kepala Subbagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum, Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yogyakarta	9
68.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Pekanbaru	9
69.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Denpasar	9
70.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Ambon	9
71.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Bengkulu	9
72.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Makasar	9
73.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Banjarmasin	9
74.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Jayapura	9
75.	Analisis Advokasi Hukum	7
76.	Analisis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	7
77.	Analisis Barang Milik Negara	7
78.	Analisis Bencana	7
79.	Analisis Data dan Informasi	7
80.	Analisis Hukum Pertanahan	7

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
1	2	3
81.	Analisis Hubungan Masyarakat	7
82.	Analisis Investasi dan Permodalan Usaha	7
83.	Analisis Kawasan Transmigrasi	7
84.	Analisis Kelembagaan	7
85.	Analisis Kelembagaan Usaha	7
86.	Analisis Kemitraan	7
87.	Analisis Keuangan	7
88.	Analisis Kerja Sama Lintas Sektor	7
89.	Analisis Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan	7
90.	Analisis Kerja Sama Bilateral dan Regional	7
91.	Analisis Kerja Sama Luar Negeri	7
92.	Analisis Kesenian dan Budaya Daerah	7
93.	Analisis Kesehatan	7
94.	Analisis Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur	7
95.	Analisis Kinerja	7
96.	Analisis Kurikulum dan Pembelajaran	7
97.	Analisis Laporan Keuangan	7
98.	Analisis Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	7
99.	Analisis Laporan Realisasi Anggaran	7
100.	Analisis Layanan Umum	7
101.	Analisis Lingkungan Hidup	7
102.	Analisis Mitigasi Bencana	7
103.	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	7
104.	Analisis Mutu Produk	7
105.	Analisis Organisasi	7
106.	Analisis Pangan	7
107.	Analisis Pelaksanaan Anggaran	7
108.	Analisis Pelayanan	7
109.	Analisis Pelayanan Sosial	7
110.	Analisis Pemanfaatan Teknologi	7
111.	Analisis Pemasaran dan Kerja Sama	7
112.	Analisis Pembangunan	7
113.	Analisis Pemberdayaan Masyarakat	7
114.	Analisis Pembinaan Kelembagaan Investasi	7
115.	Analisis Pemerintahan Pusat	7
116.	Analisis Pendidikan	7
117.	Analisis Penelitian dan Pengembangan	7
118.	Analisis Pengawasan	7
119.	Analisis Pengembangan Ekonomi Pedesaan	7
120.	Analisis Pengembangan Kompetensi	7
121.	Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana	7

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
1	2	3
122.	Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	7
123.	Analisis Pengembangan Potensi Daerah	7
124.	Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan	7
125.	Analisis Perbendaharaan	7
126.	Analisis Perekonomian	7
127.	Analisis Perencanaan	7
128.	Analisis Perencanaan Anggaran	7
129.	Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur	7
130.	Analisis Perencanaan Strategis	7
131.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7
132.	Analisis Pertanahan	7
133.	Analisis Produk Hukum	7
134.	Analisis Program Pendidikan dan Pelatihan	7
135.	Analisis Promosi dan Kerja Sama Luar Negeri	7
136.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	7
137.	Analisis Sistem Informasi	7
138.	Analisis Sistem Informasi dan Jaringan	7
139.	Analisis Sistem Mutu dan Lingkungan	7
140.	Analisis Sosial Budaya	7
141.	Analisis Survey, Pengukuran dan Pemetaan	7
142.	Analisis Tata Laksana	7
143.	Analisis Tata Usaha	7
144.	Fasilitator Kelembagaan Pemasaran	7
145.	Fasilitator Promosi	7
146.	Fasilitator Sarana Pemasaran	7
147.	Penata Kendaraan Dinas	7
148.	Penata Laporan Keuangan	7
149.	Penelaah Data Sumber Daya Alam	7
150.	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	7
151.	Penelaah Pengembangan Usaha	7
152.	Penyuluh Usaha Mandiri dan Teknologi Tepat Guna	7
153.	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7
154.	Penyusun Bahan Kerja Sama Pelatihan	7
155.	Penyusun Bahan Prasarana Penerapan Standar	7
156.	Penyusun Laporan Hasil Pendidikan dan Pelatihan	7
157.	Penyusun Laporan Keuangan	7

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
1	2	3
158.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7
159.	Penyusun Program Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	7
160.	Penyusun Program Kelembagaan dan Kerja Sama	7
161.	Penyusun Promosi dan Kerja Sama	7
162.	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	7
163.	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	7
164.	Penyusun Rencana Kerja Sama Kelembagaan	7
165.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7
166.	Penyusun Rencana Keuangan dan Barang Milik Negara	7
167.	Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana	7
168.	Penyusun Rencana Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar	7
169.	Penyusun Rencana Peningkatan Akses Pasar	7
170.	Penyusun Rencana Promosi	7
171.	Penyusun Risalah	7
172.	Perancang Promosi	7
173.	Ajudan	6
174.	Pengelola Anggaran	6
175.	Pengelola Bahan Perencanaan	6
176.	Pengelola Barang Milik Negara	6
177.	Pengelola Barang Persediaan	6
178.	Pengelola Data	6
179.	Pengelola Distribusi dan Pemasaran	6
180.	Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum	6
181.	Pengelola Formasi dan Pengadaan Pegawai	6
182.	Pengelola Informasi Kerja Sama	6
183.	Pengelola Kelayakan Sumber Daya Alam	6
184.	Pengelola Kepegawaian	6
185.	Pengelola Kerja Sama dan Investasi	6
186.	Pengelola Keuangan	6
187.	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	6
188.	Pengelola Pemetaan Sumber Daya Investasi	6
189.	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	6
190.	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	6
191.	Pengelola Pengembangan Karir	6

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
1	2	3
192.	Pengelola Penguatan dan Pemberdayaan Lembaga	6
193.	Pengelola Program dan Kegiatan	6
194.	Pengelola Rumah Tangga	6
195.	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	6
196.	Pengelola Surat	6
197.	Pengolah Data	6
198.	Pengolah Data Kelembagaan	6
199.	Pengolah Data Pembinaan Kelembagaan Investasi	6
200.	Petugas Protokol	6
201.	Pranata Barang dan Jasa	6
202.	Pranata Kearsipan	6
203.	Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	6
204.	Pengadministrasi Kepegawaian	5
205.	Pengadministrasi Keuangan	5
206.	Pengadministrasi Pelatihan	5
207.	Pengadministrasi Pemerintahan	5
208.	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5
209.	Pengadministrasi Persuratan	5
210.	Pengadministrasi Pertanahan	5
211.	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5
212.	Pengadministrasi Umum	5
213.	Pengemudi VIP	5
214.	Teknisi Peralatan, Listrik dan Elektronika	5
215.	Petugas Keamanan	3

C. DAFTAR NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN UNTUK PEJABAT FUNGSIONAL

No	Nama Jabatan	Jenjang	Kelas Jabatan
1	2	3	4
1.	Analisis Kebijakan	Ahli Pertama	8
		Ahli Muda	10
		Ahli Madya	12
		Ahli Utama	14
2.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	Terampil	6
		Mahir	7
		Penyelia	8

No	Nama Jabatan	Jenjang	Kelas Jabatan
1	2	3	4
3.	Analisis Kepegawaian/Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya	8 10 12
4.	Arsiparis	Pelaksana/Terampil Pelaksana Lanjutan/Mahir Penyelia Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya Ahli Utama	6 7 8 8 9 11 13
5.	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur	Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya Ahli Utama	8 10 12 14
6.	Auditor	Pelaksana/Terampil Pelaksana Lanjutan/Mahir Penyelia Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya Ahli Utama	6 7 8 8 10 12 14
7.	Auditor Kepegawaian	Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya	8 9 11
8.	Pranata Komputer	Pelaksana/Terampil Pelaksana Lanjutan/Mahir Penyelia Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya Ahli Utama	6 7 8 8 9 11 13

No	Nama Jabatan	Jenjang	Kelas Jabatan
1	2	3	4
9.	Dokter Gigi	Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya Ahli Utama	9 10 12 14
10.	Dokter	Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya Ahli Utama	9 10 12 14
11.	Peneliti	Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya Ahli Utama	8 9 12 14
12.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya	8 10 12
13.	Penggerak Swadaya Masyarakat	Pelaksana/Terampil Pelaksana Lanjutan/Mahir Penyelia Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya Ahli Utama	6 7 8 8 10 11 14
14.	Perancang Peraturan Perundang-undangan	Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya Ahli Utama	8 9 11 13
15.	Analisis Hukum	Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya	8 9 11

No	Nama Jabatan	Jenjang	Kelas Jabatan
1	2	3	4
16.	Perawat	Pelaksana Pemula	5
		Pelaksana	6
		Mahir	7
		Penyelia	8
		Ahli Pertama	8
		Ahli Muda	9
		Ahli Madya	11
17.	Perencana	Ahli Pertama	8
		Ahli Muda	10
		Ahli Madya	12
		Ahli Utama	14
18.	Pranata Hubungan Masyarakat	Pelaksana	6
		Pelaksana Lanjutan/Mahir	7
		Penyelia	8
		Ahli Pertama	8
		Ahli Muda	9
		Ahli Madya	11
19.	Statistisi	Pelaksana/Terampil	6
		Pelaksana Lanjutan/Mahir	7
		Penyelia	8
		Ahli Pertama	8
		Ahli Muda	9
		Ahli Madya	11
20.	Widyaiswara	Ahli Pertama	8
		Ahli Muda	9
		Ahli Madya	11
		Ahli Utama	13
21.	Analisis Anggaran	Ahli Pertama	8
		Ahli Muda	10
		Ahli Madya	12
		Ahli Utama	14


No	Nama Jabatan	Jenjang	Kelas Jabatan
1	2	3	4
22.	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Ahli Pertama	8
		Ahli Muda	10
		Ahli Madya	12
23.	Teknisi Penelitian dan Perencanaan	Pemula	5
		Terampil	6
		Pelaksana Lanjutan/Mahir	7
		Penyelia	8

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum



Teguh